KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mahfud MD: Presiden Minta Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar
Tanggal : Selasa, 08 Maret 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 5

Mahfud MD: Presiden Minta Pemilu 2024 Berjalan Aman dan Lancar

JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak menginginkan ada penundaan Pemilu 2024 maupun penambahan masa jabatan. Mahfud menuturkan, Kepala Negara malah meminta pemilu dapat tetap dilaksanakan pada 2024.

Hal itu disampaikan Presiden kepada Mahfud, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan. "Justru Presiden meminta Menkopolhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk memastikan Pemilu 2024berjalanamandanlancar," ungkap Mahfud kemarin.

Mahfud mengatakan, Jokowi juga memerintahkan kepadanya agar pesta demokrasi tidaklah memboroskan anggaran negara. Lalu, penekanan Presiden yaitu masa kampanye hingga memasuki masa pelantikan para peserta pemilu terpilih tak terlalu lama. "Pemilu 2024 tidak memboroskan anggaran, tidak terlalu lama masa kampanyenya, dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024," jelasnya.

Hal itu, kata Mahfud, bertujuan agar kenaikan suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru 2024 tidak terlalu lama. "Ini disampaikan oleh Presiden pada rapat 14 September 2021," katanya.

Dia mengatakan Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Saat itu mantan Wali Kota Solo itu menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024. "Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Januari 2022," ucapnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi pada pekan awal Maret 2022 menanggapi wacana penundaan Pemilu 2024 kepada media. Jokowi mengatakan siapa pun boleh mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024 ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode baik menteri, partai politik, ataupun warga karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat. Pernyataannya ini pun mengundang kritik beberapa kalangan. Presiden dianggap tidak tegas dan memberikan pernyataan bersayap.

Terkait hal tersebut, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menegaskan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas yakni tunduk terhadap konstitusi terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Faldo meminta pihak-pihak untuk tidak berprasangka buruk terhadap Presiden Jokowi. "Itu pikiran yang bersayap dari sebagian pihak yang disebutkan itu. Statemen Presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah otak-atik gatuk," kata Faldo kepada wartawan kemarin.

Faldo meminta semua pihak agar melihat semua sudut pandang dari konstruksi kenegaraan. "Saya kira kita berada dalam sebuah konstruksi kenegaraan. Jadi, ini harus dilihat dalam kerangka kenegaraan, jangan maunya Presiden, *pengennya gini* dan *gitu* dari elite-elite," katanya.

Faldo menegaskan kepada semua pihak bahwa Presiden Jokowi telah bersikap mengenai penundaan Pemilu 2024 yakni tunduk terhadap konstitusi. Maka itu, Faldo meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi yang tidak-tidak mengenai pernyataan Presiden Jokowi. "Saya kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap. Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, kaget sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. *Kan* aneh," kata Faldo.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benar-benar mewujudkan komitmennya pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dahulu diucapkan dalam sumpah jabatan saat pelantikan presiden. Apalagi, pada 31 Januari 2022 pemerintah, penyelenggara pemilu, seluruh fraksi di DPR dan DPD telah bersepakat bahwa pemilu digelar pada 14 Februari 2024. "Sehingga tidak ada opsi penundaan pemilu. Agar demokrasi masih bisa dipercaya oleh rakyat, agar semua spekulasi kontraproduktif ini dapat dihentikan, dan agar semua pihak mempersiapkan Pemilu 2024 dengan lebih baik, supaya tak terulang lagi masalah-masalah pada pemilu sebelumnya sehingga hasil pilpres juga lebih baik lagi," katanya.

Menurut HNW, Presiden Jokowi tentu mendapat laporan bahwa usulan penundaan pemilu tersebut selain menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, juga mendapat penolakan besar dan meluas dari berbagai elemen bangsa sehingga tidak memungkinkan jika usulan itu ditindaklanjuti secara konstitusional ke MPR. Apalagi, kata Hidayat, peta politiknya sangat jelas, partai yang mengusulkan penundaan pemilu tidak bertambah. Yang mendukung di antaranya PKB, Partai Golkar, dan PAN, tapi beberapa pimpinan Golkar malah menolak usulan itu. Sementara pihak yang menolak seperti PDIP, PKS, NasDem, PD, PPP, dan Gerindra tetap solid menolak, bahkan Ketua DPR, Ketua DPD, dan para Pimpinan MPR ikut menegaskan menolak.

"Maka seandainya pimpinan tiga partai pengusul itu solid memperjuangkan usulannya dan menyampaikan ke MPR untuk mengubah UUD, maka manuver mereka belum memenuhi syarat minimal yang diberlakukan oleh konstitusi, yaitu diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR (Pasal 37 ayat 1 UUD NRI 1945). Karena jumlah anggota MPR dari tiga partai itu seandainya solid pun, baru berjumlah 187 anggota. Padahal, diperlukan minimal 1/3 anggota MPR yaitu 237 anggota MPR," jelasnya.

Oraka dwi ananto/ riezky maulana/kiswondari